

PENILAIAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERMUKIMAN PURUS

Suryanti¹⁾, Sudirman Is²⁾, Era Triana³⁾

Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Bung Hatta

Email: Suryanti.pl1977@yahoo.co.id, sudirmanis@bunghatta.ac.id, eratriana@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penanganan infrastruktur di kawasan permukiman Purus saat ini belum dilakukan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menilai peran dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan infrastruktur dengan menggunakan standar kriteria desain yang sesuai standar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan delapan tangga tingkatan partisipasi Arnstein. Tingkat partisipasi masyarakat mulai pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan tidak mengalami peningkatan dan berada pada tingkat keempat yaitu *consultation*. Dari segi penanganan infrastruktur permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu permasalahan persampahan, kondisi drainase dan jalan lingkungan yang belum sesuai dengan standar PSU minimum, yang hal ini menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur belum maksimal.

Keyword : Bentuk Partisipasi, Tingkat Partisipasi, Penanganan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Kelurahan Purus adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Padang dan termasuk kedalam Kecamatan Padang Barat, yang memiliki luas wilayah sebesar 68 Ha, yang terdiri dari 8 (delapan) RW dan 28 RT. Jumlah penduduk Kelurahan Purus berdasarkan data BPS di Kelurahan Purus tahun 2019 sebanyak 8.375 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang ada sebesar 123,16 Ha/jiwa.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang nomor 163 Tahun 2014 mengenai lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, Kelurahan Purus termasuk dalam lokasi kawasan permukiman kumuh. Dan pada tahun 2020 mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 519 tentang lokasi kawasan kumuh yang ada di Kota Padang, dimana Kelurahan Purus tidak lagi termasuk di dalam kawasan Kumuh.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk merumuskan permasalahan infrastruktur di lokasi penelitian menemukan tingkat partisipasi, bentuk partisipasi dalam penanganan infrastruktur di lokasi penelitian, serta merumuskan penanganan infrastruktur berdasarkan standar perumahan dan permukiman (kriteria desain dalam penanganan infrastruktur). Sedangkan analisis kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat ini dibutuhkan mengacu pada teori Arnstein "8 tingkat partisipasi masyarakat" yaitu *manipulation, therapy, information, consultation, placation, partnership, delegated power dan citizen power*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

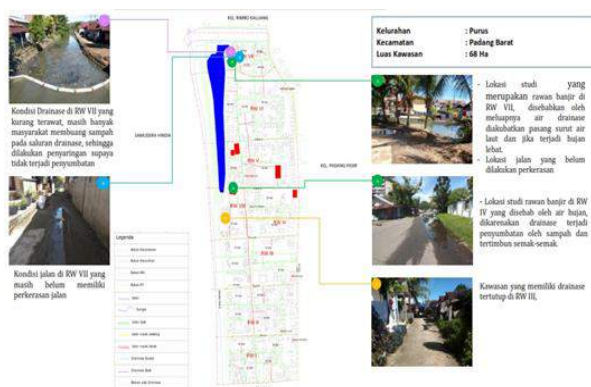
Untuk menghasilkan penilaian partisipasi masyarakat terhadap penanganan infrastruktur di kawasan permukiman Purus ini, dilihat dari bentuk dan tingkat

partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pembangunan, yang mana bentuk dan tingkat partisipasi dijadikan sebagai variabel. Bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa indikator yaitu; tenaga, pikiran, keahlian, bahan/materi, uang, dan tidak memberikan sumbangan apapun. Bentuk partisipasi yang paling dominan diberikan masyarakat pada tahap perencanaan hingga tahap pembangunan di lokasi studi adalah berupa sumbangan ide/ pikiran, keahlian dan tenaga dikarenakan masyarakat dalam memberikan sumbangan ide/pikiran tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya cukup dengan memberikan suara atau pendapat di setiap pertemuan, dan sumbangan berupa barang atau uang hanya diberikan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial cukup tinggi, karena, penduduk di Kelurahan Purus memiliki penghasilan menengah kebawah.

Untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembangunan terdiri dari beberapa indikator, yaitu ; kehadiran dalam pertemuan, keterlibatan dalam kegiatan fisik, keaktifan dalam diskusi dan keanggotaan dalam kegiatan. Dalam hal menentukan kategori tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan tipologi tangga partisipasi dari Arnstein (1969).

No	Jenjang Partisipasi Arnstein	Skor
1	<i>Manipulation</i>	100 – 187,5
2	<i>Therapy</i>	187,5 – 275
3	<i>Informing</i>	275 – 362,5
4	<i>Consultation</i>	362,5 – 450
5	<i>Placation</i>	450 – 537,5
6	<i>Partnership</i>	537,5 – 625
7	<i>Delegated Power</i>	625 – 712,5
8	<i>Citizen Control</i>	712,5 – 800

Dari hasil analisis mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan memiliki tingkat partisipasi pada level keempat yaitu *consultation*. Di tahap perencanaan memiliki skor rata-rata yaitu 384,5 dan pada tahap pembangunan memiliki nilai 371,25. Dapat dikatakan pada tingkat tangga ini masyarakat mendapat informasi dan boleh berpendapat tetapi pendapatnya tidak diperhitungkan. Hasil observasi ke lokasi studi (Kelurahan Purus) terdapat beberapa permasalahan infrastruktur yang masih perlu penanganan baik itu dari pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Adapun permasalahan infrastruktur di lokasi studi terdiri dari: permasalahan drainase, jalan dan persampahan



Gambar 1. Permasalahan Infrastruktur

Bentuk penanganan infrastruktur yang dapat dilakukan di lokasi studi dalam Standar Pelayanan Minimal perumahan dan permukiman dalam konsep gambar berikut



Gambar 2. Kondisi Jalan Lingkungan Yang Belum Dilakukan Penanganan

Sesuai standar perencanaan jaringan jalan lingkungan pada jaringan jalan tersebut perlu diperbaiki dan juga dilengkapi dengan jaringan drainase. Hal ini berfungsi untuk pembuangan air hujan agar tidak tergenang pada badan jalan yang nantinya jalan akan cepat rusak



Gambar 3. Tidak tersedianya saluran drainase



Gambar 4. Konsep penyediaan sarana pembuangan sampah secara terpilah

KESIMPULAN

Bentuk partisipasi yang paling dominan diberikan masyarakat adalah berupa sumbangan tenaga, ide/pikiran dan keahlian, hal ini juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat di lokasi studi. Tingkat partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara memberikan informasi dan sosialisasi penanganan infrastruktur melalui proses rembuk warga, sehingga memunculkan kesadaran masyarakat untuk mengambil bagian dan turut berpartisipasi dalam kegiatan. Penanganan permasalahan-permasalahan infrastruktur yang ada dengan mengacu kepada Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016, mengenai peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman terhadap perumahan dan permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- John Gaventa and et all, 2001 “*Mewujudkan Partisipasi, Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*”.
- Kogoya, T. dkk. 2015. “*Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 2 – Juni 2015
- Peter Oakley, 1991 Projects With People, “*The Practice Of Participation in Rural Development*”
- Britha Mikkelsen, 1999 “*Metode Penelitian Partisipatoris & Upaya-upaya Pemberdayaan*”
- Chaerunnissa, Chika, 2014. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambak Serang Kecamatan Bantarkawang)*”. Jurnal Politik, Vol. 5, No.2, Oktober 2014.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Grigg, 1998, *Infrastructure Engineering and Management*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Holil, Sulaiman, 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung.